

LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan

TAHUN
2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau dapat diselesaikan.

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta pemanfaatan sumber daya yang dikelola selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP; Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta ketentuan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi yang berlaku (misalnya Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Permen PANRB Nomor 22 Tahun 2024).

Semoga LKjIP Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan dalam peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

**PLT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU,**

Thomas Larfo Dimeira, ST, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790529 200604 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN..... | 2 |
| 1.3 DASAR HUKUM..... | 3 |
| 1.4 STRUKTUR ORGANISASI..... | 4 |
| 1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM) | 8 |
| 1.4.2 Aset dan Peralatan..... | 9 |
| 1.5 TUGAS DAN FUNGSI..... | 11 |
| 1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI..... | 13 |
| 1.7 PERMASALAHAN UTAMA..... | 14 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 21 |
| 2.2 PERJANJIAN KINERJA 2025..... | 28 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 DEFENISI INDIKATOR | 29 |
| 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 29 |
| 3.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI..... | 52 |
| 3.4 REALISASI ANGGARAN..... | 54 |
| BAB IV PENUTUP | |
| KESIMPULAN UMUM..... | 116 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1. | Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jabatan Eselon Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 8 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Aset dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan..... | 9 |
| Tabel 1.3 | Isu Strategis..... | 14 |
| Tabel 1.4 | Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau..... | 18 |
| Tabel 1.5 | Tindak Lanjut LHE SAKIP Perangkat Daerah Dinas PUPRPKPP Tahun 2024..... | 19 |
| Tabel 2.1 | Indikator Kinerja Pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2024-2029..... | 21 |
| Tabel 2.2 | Rumusan Strategi dan Kebijakan..... | 24 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas..... | 28 |
| Tabel 3.1 | Nilai bobot penyelenggaraan bangunan dan lingkungan strategis..... | 29 |
| Tabel 3.2 | Target bobot per tahun penyelenggaraan bangunan dan lingkungan strategis..... | 30 |
| Tabel 3.3 | Target Pemenuhan Kapasitas layanan air minum..... | 31 |
| Tabel 3.4 | Target persentase layanan air minum s/d 2025..... | 32 |
| Tabel 3.5 | Formulasi indikator Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air..... | 33 |
| Table 3.6 | Skala Nilai perangkat Kinerja..... | 35 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dari baseline tahun 2024..... | 36 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Target dan Capaian kinerja tahun 2025..... | 43 |
| Tabel 3.9 | Rekap Luas Dan Jumlah Kawasan Kumuh Di Provinsi Riau Berdasarkan Rpjmd 2025 -2029..... | 44 |
| Tabel 3.10 | SubKegiatan yang mendukung indikator kegiatan utama..... | 46 |
| Tabel 3.11 | Faktor pendorong/penyebab, hambatan, dan solusi/tindak lanjut Tahun Anggaran 2026..... | 52 |
| Tabel 3.12 | Realisasi anggaran per program/kegiatan/subkegiatan TA 2025..... | 55 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar Bagan 1.1 | 6 |
| Gambar Grafik 1 Capaian Indikator 1 | 38 |
| Gambar Grafik 2 Capaian Indikator 2 | 39 |
| Gambar Grafik 3 Capaian Indikator 3 | 40 |
| Gambar Grafik 4 Capaian Indikator 4 | 40 |
| Gambar Grafik 5 Capaian Indikator 5 | 40 |
| Gambar Grafik 6 Capaian Indikator 6 | 41 |
| Gambar Grafik 7A Capaian Indikator 7A..... | 41 |
| Gambar Grafik 7B Capaian Indikator 7B..... | 41 |
| Gambar Grafik 8 Capaian Indikator 8 | 42 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP disusun untuk menyajikan informasi capaian kinerja perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2025 serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan manajemen kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas penggunaan seluruh sumber dayanya; meliputi sumber daya manusia (*Human Resources*), sarana prasarana, serta anggaran (*Fund*) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran berlangsung.

Pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 1.316.459.060.877.514** untuk mewujudkan penyelenggaraan kemantapan jalan, pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur permukiman, pembangunan dan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Riau, pembinaan jasa konstruksi, serta mewujudkan tata Kelola Rencana Tata ruang yang baik dan terencana serta berkelanjutan. Hal tersebut di atas merupakan target capaian yang tertuang pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2025-2029, serta Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2025.

Atas penjabaran tugas dan fungsi tersebut, serta memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mewujudkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau berkewajiban dalam pelaksanaannya untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini juga memuat ikhtisar pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Laporan Kinerja ini juga akan menjelaskan capaian kinerja tahun berjalan, perbandingan kinerja antara capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, perbandingan antara capaian kinerja tahun berjalan dengan target kinerja lima tahun yang tertuang pada dokumen RENSTRA, serta analisis penyebab keberhasilan serta kegagalan dalam pencapaian kinerja baik pada skala program maupun kegiatan pada tahun berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 meliputi 4 segmen naratif; BAB I PENDAHULUAN memuat penjabaran latar belakang dan aspek strategis yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), BAB II PERENCANAAN KINERJA mengurai penjelasan terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah serta pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, BAB III AKUNTABILITAS KINERJA memuat pengukuran dan formulasi terkait capaian kinerja serta analisis-analisis yang diperlukan dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja perangkat daerah, dan BAB IV PENUTUP sebagai konklusi dari pengukuran yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Lapoaran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah untuk mempertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah:

1. Menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan;
2. Memberikan informasi yang terukur tentang kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh instansi pemerintah;
3. Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerjanya;
4. Memfasilitasi evaluasi dan pengendalian kinerja instansi pemerintah;
5. Memastikan akuntabilitas kinerja dan pengendalian kinerja instansi pemerintah;
6. Meningkatkan transparansi kinerja instansi pemerintah;

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP ini meliputi:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
- Peraturan daerah/peraturan gubernur Nomor 44 Tahun 2016 terkait SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Dokumen perencanaan daerah yang berlaku pada TA 2025 (RPJMD/RPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah).

1.4 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan kewenangan daerah dan TugasPembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi terdapat Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dalam Pergub No.46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

1. Seksi Sungai, Danau dan Pantai; dan
2. Seksi Irigasi, Rawa.

c. Bidang Bina Marga terdiri dari:

1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:

1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

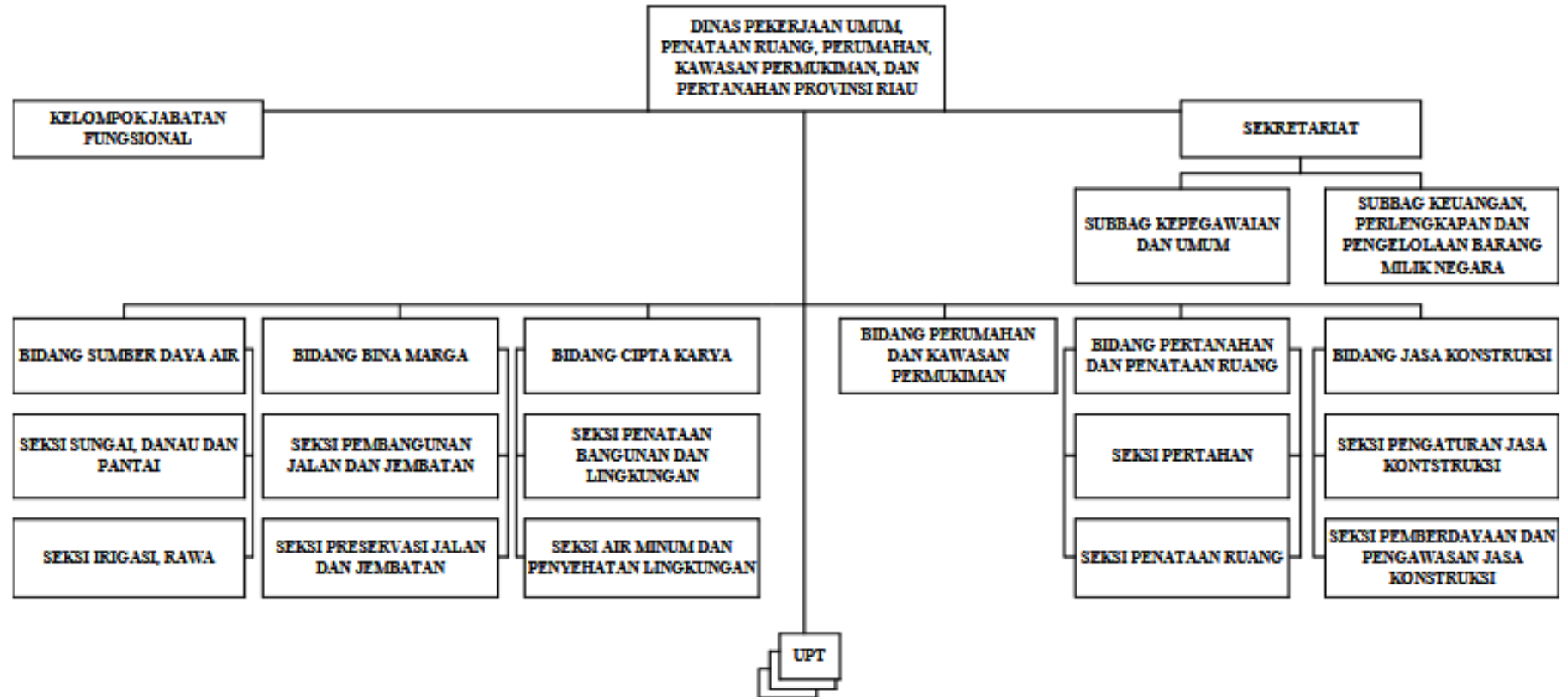
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pertanahan; dan
 - 2. Seksi Penataan Ruang.
- g. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;
- j. UPT Pengelolaan Air Minum, Kelas A;
- k. UPT Peralatan Konstruksi, Kelas B;
- l. UPT Wilayah I, Kelas A;
- m. UPT Wilayah II, Kelas A;
- n. UPT Wilayah III, Kelas A;
- o. UPT Wilayah IV, Kelas A;
- p. UPT Wilayah V, Kelas A;
- q. UPT Wilayah VI, Kelas A;

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Bagan 1.1. sebagai berikut :

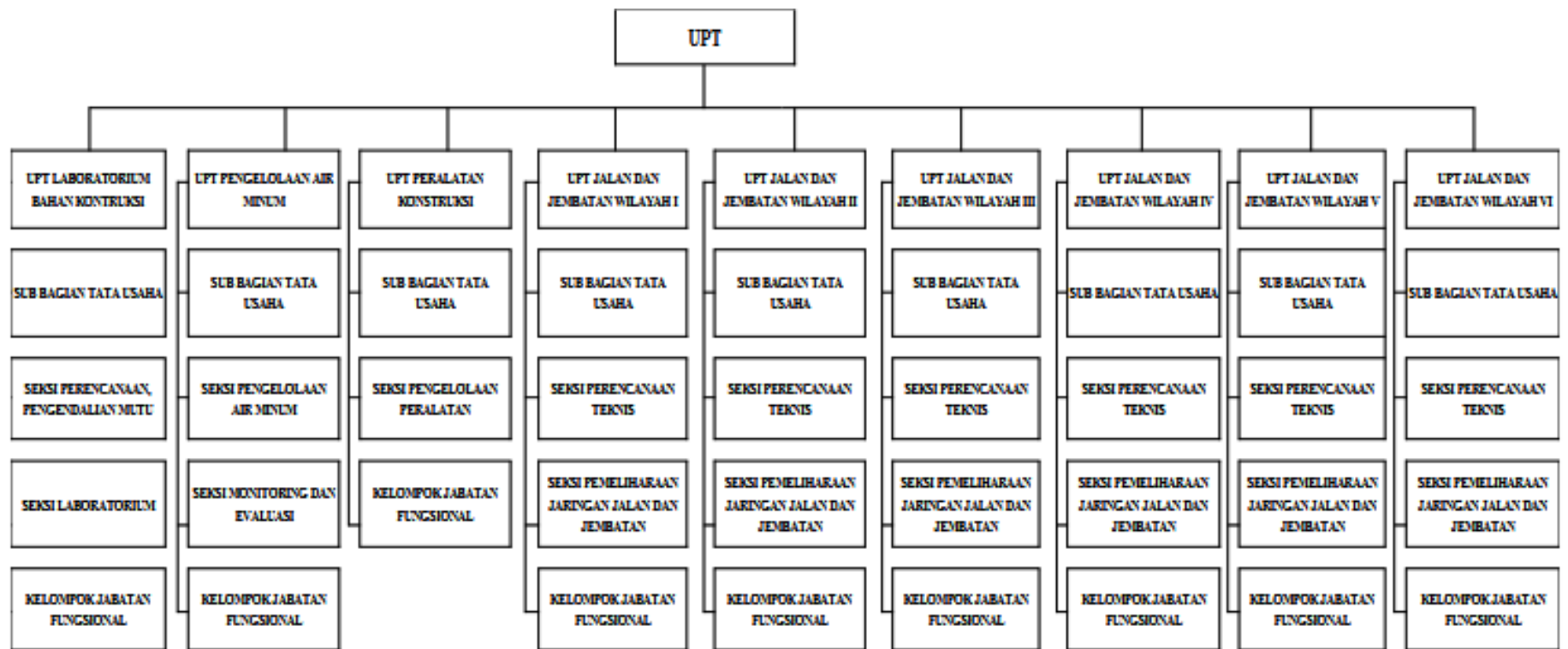
Bagan 1.1

Bagan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau



Sumber: Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau menjelaskan pada Pasal 3 ayat 1 huruf d nomor 3 bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau pada tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan berdasarkan jabatan masing-masing Bidang/UPT diuraikan berdasarkan pada Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jabatan Eselon Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

| No | Jenis Kelamin | Golongan | | | | Jumlah | Pendidikan | | | | | | | | | Jumlah | Struktural | | | | Jumlah |
|----|---------------|----------|----|-----|----|--------|------------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|--------|------------|-----|----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | | SD | SLTP | SLTA | DIII | D IV | S1 | S2 | S3 | I | | II | III | IV | | |
| 1 | Laki-laki | 0 | 52 | 243 | 41 | 336 | 0 | 0 | 81 | 16 | 0 | 165 | 73 | 0 | 336 | 0 | 1 | 15 | 32 | 48 | |
| 2 | Perempuan | 0 | 12 | 93 | 15 | 120 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 69 | 27 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| | | 0 | 64 | 336 | 56 | 456 | 0 | 0 | 98 | 23 | 0 | 234 | 100 | 0 | 456 | 0 | 1 | 15 | 38 | 54 | |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2025

1.4.2 Aset Dan Peralatan

Jumlah aset dan peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau pada Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2 Jumlah Aset dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

| AKUN | KELOM POK | JENIS | OBJEK | URAIAN | UNIT | NILAI |
|------|--------------|-------|-------|---|----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | | | ASET TETAP | 33390,2 | 29.690.272.985.932,10 |
| 1 | 3 | 1 | | Tanah | 196 | 7.408.555.344.631,60 |
| 1 | 3 | 1 | 01 | Tanah | 161 | 7.408.555.344.631,60 |
| 1 | 3 | 2 | | Pemlatan dan Mesin | 25280,20 | 231.467.039.480,09 |
| 1 | 3 | 2 | 01 | Alat Besar | 324 | 96.833.466.662,33 |
| 1 | 3 | 2 | 02 | Alat Angkut | 229 | 54.031.906.890,78 |
| 1 | 3 | 2 | 03 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 522 | 3.520.269.497,07 |
| 1 | 3 | 2 | 04 | Alat Pertanian | 199 | 126.796.182,00 |
| 1 | 3 | 2 | 05 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 16819 | 33.886.674.248,08 |
| 1 | 3 | 2 | 06 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 231 | 2.065.002.452,94 |
| 1 | 3 | 2 | 07 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 610 | 375.254.000 |
| 1 | 3 | 2 | 08 | Alat Laboratorium | 3717 | 19.987.943.790,39 |
| 1 | 3 | 2 | 09 | Alat Persenjatan | 308 | 2.880.972.253,89 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Komputer | 1300 | 13.672.670.687,41 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Eksplorasi | 243 | 449.078.711,00 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengeboran | 0 | - |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian | 31 | 92.030.250,00 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat Barut Eksplorasi | 0 | - |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Alat Keselamatan Kerja | 5 | 55.610.651,99 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Alat Peraga | 0 | - |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Pemlatan Proses/Produksi | 0 | - |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Rambu-rambu | 741 | 3.484.363.202,21 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Pemlatan Olahraga | 1 | 5.000.000,00 |
| 1 | 3 | 3 | | Gedung dan Bangunan | 83 | 552.244.231.598,09 |
| 1 | 3 | 3 | 01 | Bangunan Gedung | 69 | 540.455.200.710,98 |
| 1 | 3 | 3 | 02 | Monumen | 0 | - |
| 1 | 3 | 3 | 03 | Bangunan Menara | 0 | - |
| | | | 04 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 14 | 11.789.030.887,11 |
| 1 | 3 | 4 | | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 945 | 17.957.318.239.376,90 |
| 1 | 3 | 4 | 01 | Jalan dan Jembatan | 221 | 16.188.673.329.166,50 |
| 1 | 3 | 4 | 02 | Bangunan Air | 663 | 1.029.505.243.631,69 |
| 1 | 3 | 4 | 03 | Instalasi | 18 | 49.436.427.104,53 |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----|--|-------------|-----------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 04 | Jaringan | 43 | 689.703.239.474,20 |
| 1 | 3 | 5 | | Aset Tetap Lainnya | 6490 | 2.911.823.036.183,75 |
| 1 | 3 | 5 | 01 | Bahan Perpustakaan | 369 | 9.704.179.281,74 |
| 1 | 3 | 5 | 02 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 0 | - |
| 1 | 3 | 5 | 03 | Hewan | 0 | - |
| 1 | 3 | 5 | 04 | Ikan | 0 | - |
| 1 | 3 | 5 | 05 | Tanaman | 2 | 9.517.010.400,00 |
| 1 | 3 | 5 | 06 | Barang Koleksi Non Budaya | 0 | - |
| 1 | 3 | 5 | 07 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 6119 | 2.892.601.846.502,01 |
| 1 | 3 | 6 | | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 396 | 628.865.094.661,67 |
| 1 | 3 | 6 | 01 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 396 | 628.865.094.661,67 |
| 1 | 3 | 7 | | Akumulasi Penyusutan | 0 | - |
| 1 | 3 | 7 | 01 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | - |
| 1 | 3 | 7 | 02 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | - |
| 1 | 3 | 7 | 03 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi | 0 | - |
| 1 | 3 | 7 | 04 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 | - |
| 1 | 5 | | | ASET LAINNYA | 3950 | 13.448.901.235,72 |
| 1 | 5 | 2 | | Kemitraaan Dengan Pihak Ketiga | 1 | 4.993.313.102,06 |
| 1 | 5 | 2 | 01 | Kemitraaan Dengan Pihak Ketiga | 1 | 4.993.313.102,06 |
| 1 | 5 | 3 | | Aset Tidak Berwujud | 10 | 1.957.941.644,12 |
| 1 | 5 | 3 | 01 | Aset Tidak Berwujud | 10 | 1.957.941.644,12 |
| 1 | 5 | 4 | | Aset Lain-Lain | 3939 | 6.497.646.489,54 |
| 1 | 5 | 4 | 01 | Aset Lain-Lain | 3939 | 6.497.646.489,54 |
| 1 | 5 | 5 | | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0 | - |
| 1 | 5 | 5 | 01 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0 | - |
| 1 | 5 | 6 | | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | 0 | - |
| 1 | 5 | 6 | 01 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | 0 | - |

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024

1.5 Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Kesekretariatan

- Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan Gedung kantor
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan administrasi terkait surat menyurat dan kepegawaian

2. Bidang Sumber Daya Air

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan provinsi. Pemeliharaan sungai, Pantai pada wilayah sungai kewenangan provinsi
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

3. Bidang Bina Marga,

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan kewenangan provinsi.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

4. Bidang Cipta Karya,

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan kewenangan provinsi.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
 - Pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
6. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang,
 - Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah relokasi program pemerintah.
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
7. Bidang Bina Jasa Konstruksi;
- Pelaksanakan kegiatan pelatihan tenaga konstruksi,
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah I,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan
 - Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
9. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah II,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
10. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah III,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
11. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah IV,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
12. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah V,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
13. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan Wilayah VI,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
14. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi,
- Penyusunan dan perumusan kegiatan kelayakan bahan konstruksi
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
15. Unit Pelaksanaan Teknis Peralatan Konstruksi
- Penyusunan dan perumusan kegiatan pengelolaan alat konstruksi
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
16. Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Air Minum.
- Penyusunan dan perumusan kegiatan penyediaan air minum curah SPAM Regional
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan infrastruktur. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berperan dalam mendukung misi ke satu dan dua yakni Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya dan Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.

1.7 Permasalahan Utama

Ringkas isu strategis/permasalahan utama Tahun 2025 dan akar masalahnya terdapat dalam Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Isu Strategis

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Sub Urusan Jalan | | | |
| 1 | Indeks aksesibilitas rata-rata tingkat Provinsi masih rendah | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (realisasi 2025) mencapai 62,61%; masih terdapat 37,39% ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak ringan sampai rusak berat. Masih terdapat jenis konstruksi perkerasan jalan yang masih sub-standar (kerikil, tanah atau belum tembus). | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala tidak dilakukan pada seluruh ruas karena keterbatasan anggaran. - Beban kendaraan yang melewati ruas jalan melebihi batas maksimal kekuatan jalan. - Terbatasnya anggaran pembangunan jalan. |
| Sub Urusan Air Minum | | | |
| 2 | Terbatasnya akses air bersih yang berasal dari leding/perpipaan | Capaian layanan air minum curah lintas Kab/Kota Potensi empat sungai besar yang belum termanfaatkan menjadi sumber air baku bagi pelayanan air bersih perpipaan. Realisasi 2025: 92,17% (dari BPS) | <ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya SPAM-Regional yang fungsional. - SPAM permukiman belum dapat memenuhi kebutuhan air minum karena kapasitas produksi yang rendah. - Perlu dilakukan program pengelolaan sumber air baku untuk penyediaan pelayanan air bersih perpipaan. |
| Sub Urusan Penyehatan Lingkungan (Persampahan dan Air limbah) | | | |
| 3 | Pengelolaan sanitasi belum optimal | Jumlah sampah dan limbah mengalami peningkatan. Capaian perencanaan SPALD Regional (realisasi 2024) sebesar 50,00%; pembangunan lahan TPA yang terbangun (realisasi 2024) sebesar 0,00%. Realisasi 2025: Capaian perencanaan SPALD Regional 0%; pembangunan lahan TPA yang terbangun 0%. | Belum tersedianya fasilitas pengelolaan sampah dan air limbah yang optimal. |
| Sub Urusan Sumber Daya Air | | | |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4 | Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Jaringan Irigasi | Kondisi jaringan irigasi yang kurang baik belum dapat melayani secara maksimal kebutuhan air pertanian. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (realisasi 2024) sebesar 21,25% (target 21,61%). Realisasi 2025: 17% (target 17,84%). | Pemeliharaan jaringan irigasi secara rutin dan berkala tidak maksimal. Terbatasnya anggaran APBN dan APBD dalam menangani kegiatan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan daerah irigasi kewenangan Provinsi. |
| 5 | Kerentanan resiko genangan banjir | Menurunnya daya tampung sungai dan sistem drainase. Tingginya sedimentasi pada DAS utama. Tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir. Realisasi 2025:0,55 (target 0,57). | Saluran pembuangan air tidak fungsional secara maksimal. Pemeliharaan kawasan penyangga DAS tidak dilakukan secara maksimal. Tidak adanya penanganan abrasi pantai yang maksimal. |
| Sub Urusan Perumahan | | | |
| 6 | Frekuensi terjadinya bencana di Provinsi Riau | Provinsi Riau termasuk daerah yang rawan bencana. | 1. Tingginya kerusakan rumah akibat bencana. 2. Fasilitasi rumah korban bencana belum memadai. |
| 7 | Meningkatnya Program Pembangunan Pemerintah yang terkena relokasi program pemerintah | Meningkatnya penyediaan penanganan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. | Penanganan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah belum memadai. |
| Sub Urusan Permukiman dan Kawasan Permukiman | | | |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8 | Lingkungan permukiman yang tidak layak dan belum tertata | Kawasan kumuh yang masih belum ditangani secara maksimal; capaian penanganan kawasan kumuh (realisasi 2024) sebesar 43,47% (target 49,34%). Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang belum terencana dan teratur. Kawasan strategis yang masih belum ditangani secara baik. Realisasi 2025: 0 % (Target 0%). | Luasnya permukiman kumuh. Potensi kawasan strategis yang belum dikembangkan dengan sempurna. Masih kurangnya dukungan infrastruktur permukiman di kawasan strategis. |
| Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) | | | |
| 9 | Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman yang belum memadai | Luasnya permukiman yang memerlukan infrastruktur dasar yang layak. Besarnya jumlah permukiman yang belum mendapat layanan infrastruktur dasar. Jangkauan pelayanan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh. Capaian lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (realisasi 2024) sebesar 88,18%. Realisasi 2025: 0 % (Target 100%). | Belum seluruh masyarakat yang memerlukan dapat menikmati akses layanan infrastruktur permukiman. Belum meratanya cakupan komponen prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang dibangun. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati hunian yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. |
| Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | | | |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 10 | Masih belum terlaksananya layanan penyelenggaraan pertanahan dengan baik | Belum tertatanya layanan pertanahan. Masalah tumpang tindihnya kepemilikan lahan. Belum tersedianya data base tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang secara memadai. Belum maksimalnya penyelesaian masalah pertanahan. | Belum disusunnya kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan Pemerintah Daerah. Belum teridentifikasinya subyek dan obyek redistribusi tanah. Belum terinventarisirnya tanah adat/tanah ulayat. Belum terinventarisirnya tanah terlantar. Ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW. |

Sumber: Perubahan Renstra 2025-2029 - Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

1.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2024

Saran dan Rekomendasi Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Riau Nomor [222/LHE/INSP- RIAU/Ir.III/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2025](#) perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau beserta seluruh jajarannya untuk dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik dan berupaya meningkatkan kualitas informasi mengenai kinerja terkait dengan data dukung atas capaian kinerja output, outcome, IKU serta dinarasikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang menyatakan akan melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas informasi mengenai kinerja terkait data dukung atas capaian kinerja output, outcome, IKU serta dinarasikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), hal tersebut telah dilakukan dalam upaya mempertahankan kinerja dan peningkatan kualitas informasi atas capaian kinerja Tahun 2024 namun masih perlu perbaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

| No | URAIAN | BOBOT | NILAI TAHUN | |
|-------------------------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 22,80 | 22,80 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | 16,80 | 16,80 |
| 3 | Pelaporan kinerja | 15 | 11,40 | 11,40 |
| 4 | Evaluasi Internal | 25 | 19,75 | 18,75 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 70,75 | 69,75 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | BB | B |

Tindak Lanjut LHE Sakip Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2024 terdapat dalam Tabel 1.5 berikut :

**Tabel 1.5 TINDAK LANJUT LHE SAKIP PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

| NO | KOMPONEN SAKIP | CATATAN LHE SAKIP | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT |
|----|---------------------|--|---|---|
| 1 | PERENCANAAN KINERJA | <p>a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan pemantauan kinerja namun belum dilaksanakan secara berkala (per triwulan);</p> <p>b. Belum sepenuhnya tergambar hubungna kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang (<i>cascading</i>);</p> <p>c. Tugas dan fungsi perangkat lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>) dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum terbangun secara cukup</p> | <p>a. Merumuskan sasaran kinerja dan indikator kinerja secara konsisten dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, guna memastikan keterkaitan utuh dan berjenjang (<i>cascading</i>) dari tingkat organisasi hingga tingkat individu;</p> <p>b. Merumuskan indikator kinerja lintas perangkat daerah (<i>crosscutting</i>) dengan perangkat daerah lain untuk keterpaduan program pencapaian sasaran pembangunan daerah di RPJMD;</p> | <p>a. Telah disusun sasaran kinerja dan indikator kinerja secara konsisten dalam dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja;</p> <p>b. Akan dilakukan perumusan indikator kinerja lintas perangkat daerah (<i>crosscutting</i>) dengan perangkat daerah lain untuk keterpaduan program pencapaian sasaran pembangunan daerah di RPJMD;</p> |
| 2 | PENGUKURAN KINERJA | <p>a. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan, penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan dalam penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi;</p> <p>b. Belum melakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap realisasi Indikator Kinerja dan setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sehingga pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran dan analisis efisiensi dalam mencapai kinerja;</p> <p>c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja belum optimal sehingga sistem informasi manajemen kinerja yang ada belum mendukung pemantauan <i>real-time</i></p> | <p>c. Menetapkan target kinerja secara terukur, realistis dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai baseline;</p> <p>d. Melaksanakan pemantauan kinerja terhadap rencana aksi secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/Subbagian) setiap triwulan dengan menggunakan data yang akurat dan handal dan hasil pemantauan digunakan sebagai umpan balik dalam perumusan kebijakan atau rencana aksi;</p> <p>e. Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan seluruh unit kerja (bagian/subbagian). Laporan monitoring dan evaluasi per triwulan tersebut memuat saran pimpinan terkait penyusunan strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam</p> | <p>c. Telah ditetapkan target kinerja yang terukur, realistis dan progresif berdasarkan data tahun sebelumnya sebagai baseline. Pada indikator "Persentase Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota", kapasitas Air Minum yang disediakan sudah 100%, namun belum dapat terdistribusi secara maksimal, dikarenakan jaringan perpipaan di Kabupaten/Kota yang belum tersambung seluruhnya dan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Pada indikator "Persentase Luas Lahan TPA yang Terbangun" terdapat kendala pada pendanaan.</p> <p>d. Akan dilaksanakan pemantauan kinerja rencana aksi secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/SUbbagian) setiap triwulan dan hasil pemantauan digunakan sebagai umpan balik dalam perumusan kebijaknatau rencana aksi</p> <p>e. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama</p> |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|---|
| 3 | PELAPORAN KINERJA | <p>a. Indikator "Persentase Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota", target tahun 2024 sebesar 100%, namun realisasi hanya mencapai 25,10%. Ini menandakan perencanaan belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor sumber daya, koordinasi lintas wilayah, atau kendala teknis lainnya;</p> <p>b. Indikator "Persentase Luas Lahan TPA yang Terbangun" menunjukkan nol realisasi selama empat tahun berturut-turut, meskipun target terus meningkat. Ini memperlihatkan perencanaan yang tidak realistis atau kurang didukung dengan rencana aksi yang kuat</p> | mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja atau penyesuaian anggaran/ analisis efisiensi dalam mencapai kinerja | yang diperjanjikan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan seluruh unit kerja (bagian/subbagian). |
| NO | KOMPONEN SAKIP | CATATAN LHE SAKIP | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT |
| 4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau telah melakukan evaluasi internal atas implmentasi SAKIP namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sesuai standar yaitu belum dilakukannya evaluasi kinerja internal secara berjenjang pada seluruh bidang/subbidang yang dilakukan secara berkala, dan hasil evaluasi internal tersebut digunakan sebagai umpan balik dalam perumusan kebijakan atau rencana aksi | e. Melakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan seluruh unit kerja (bagian/subbagian). Laporan monitoring dan evaluasi per triwulan tersebut memuat saran pimpinan terkait penyusunan strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja atau penyesuaian anggaran/ analisis efisiensi dalam mencapai kinerja | e. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan seluruh unit kerja (bagian/subbagian). |

Pekanbaru, November 2025
 PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
 PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 PROVINSI RIAU

THOMAS LARFO DIMEIRA, S.T., M.M.
 Pembina Tingkat I
 19790529 200604 1 006

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah dituangkan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Riau Tahun 2024-2029

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi | Satuan | Kondisi Saat Ini (akhir 2024) | Target | | | | | | Kondisi Akhir RJMD |
|----|--|--|-----------|--------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | |
| 1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap prasarana infrastruktur dasar, bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKL) | | Nilai | - | | | | | | | |
| | | Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota | | % | 8,58 | 8,58 | 19,94 | 34,14 | 48,35 | 59,71 | 65,39 | 65,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi | Σ bangunan dan kawasan yang diselenggarakan per tahun / Σ bangunan dan kawasan yang diselenggarakan tahun | Persentase | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 2024 \times 100% | | | | | | | | | |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | | Persentase | 86,32 | 86,74 | 87,16 | 87,58 | 88,00 | 88,42 | 88,84 | 88,84 |
| | | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional | | % | 88,18 | - | - | - | - | 20,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi | Σ jumlah tenaga ahli yang telah disertifikasi / Σ jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi Provinsi Riau | Persentase | 37,25 | 45,21 | 49,32 | 51,78 | 54,25 | 56,71 | 59,18 | 59,18 |
| | | Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau | Σ Kab/Kota yang telah selesai RTRW / Σ Kab/Kota \times 100% | Persentase | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses | Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob | | Persentase | 1,41 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,54 | 1,60 | 1,67 | 1,67 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | masyarakat terhadap irigasi | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | | % | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,78 | |
| | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | Σ luas lahan pertanian fungsional / Σ luas lahan baku pertanian \times 100% | Persentase | 17,00 | 17,84 | 20,43 | 23,44 | 26,72 | 30,29 | 33,99 | 33,99 | |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | Σ jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu / Σ jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu \times 100% | Persentase | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani | Σ luasan permukiman kumuh yang tertangani sampai dengan tahun penanganan / Σ luas permukiman kumuh kewenangan Provinsi \times 100% | Persentase | 41,25 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| | | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau & Berkelanjutan | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | Poin | 71,80 | | | | | | | | - |
| 5 | Meningkatnya aksesibilitas jalan | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | Σ panjang ruas jalan kondisi mantap / Σ total panjang ruas jalan provinsi \times 100% | Persentase | 68,35 | 69,81 | 71,61 | 73,41 | 75,31 | 77,21 | 80,01 | 80,01 | |

Tabel 2.2 Rumusan Strategi dan Kebijakan

RUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau Berdelau)

MISI 3 : Memperkuat infrastruktur yang handal guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektifitas antarwilayah.

Sasaran (Misi) : Memperkuat infrastruktur yang handal guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian

Sub sasaran : Peningkatan konektifitas antarwilayah

| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan |
|--|--|---|---|---|---|
| Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis | 1 | Merehabilitasi dan memelihara sarana keagamaan strategis Provinsi | 1 | Melakukan Desain Perencanaan rehabilitasi |
| | | | | 2 | Melakukan rehabilitasi |
| | | 2 | Menata kawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis | 1 | Melakukan perencanaan kawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis yang akan ditata |
| | | | | 2 | Melakukan penataan kawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis |
| | | 3 | Meningkatkan penyelenggaraan bangunan sesuai aturan | 1 | Melakukan penetapan bangunan strategis |
| | | | | 2 | Menyelenggarakan bangunan strategis |
| | | | | 3 | Desain bangunan memperhatikan kebutuhan pengguna berdasarkan gender dan disabilitas |
| | | 4 | Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan sesuai aturan | 1 | Menata kawasan strategis sesuai peruntukan |
| | | | | 2 | Menyusun rencana penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi |
| | | | | | |
| MISI 3 : Memperkuat infrastruktur yang handal guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektifitas antarwilayah. | | | | | |
| Sasaran : Meningkatkan kualitas Infrastruktur | | | | | |
| Sub sasaran : Meningkatnya Pelayanan Transportasi | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan |
|--|--|---|--|---|---|
| Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Meningkatnya Aksesibilitas jalan | 1 | Meningkatkan konektivitas jalan | 1 | Melakukan Design Perencanaan Jalan terhadap Ruas Jalan yang belum tembus |
| | | | | 2 | Melakukan Pembebasan lahan dan Pembukaan badan jalan |
| | | | | 3 | Membangun Jalan |
| | | | | 4 | Pelebaran Badan Jalan |
| | | 2 | Memelihara Kondisi Jalan | 1 | Perbaikan Kerusakan Jalan, Baik Rusak Ringan, Rusak Sedang maupun Rusak Berat |
| | | | | 2 | Memelihara Jalan Kondisi Baik |
| | | | | 3 | Melindungi Jalan dari Daya Rusak Air |
| | | | | 4 | Meningkatkan Struktur Jalan |
| | | | | 5 | Mendata Kondisi Jalan |
| | Meningkatnya Prasarana Infrastruktur Dasar | 1 | Meningkatkan kapasitas Air Minum Curah lintas Kab/Kota | 1 | Merencanakan dan merehabilitasi SPAM Regional |
| | | | | 2 | Melakukan Pembinaan Teknis pada Kab/Kota |
| | | | | 3 | Mengelola SPAM Regional |
| | | | | 4 | Memelihara bangunan SPAM agar tetap fungsional |
| | | 2 | Meningkatkan Akses Sanitasi | 1 | Mendata Produksi Air Limbah Domestik |
| | | | | 2 | Membuat Master plan cakupan layanan limbah domestik regional |
| | | | | 3 | Menyediakan Infrastruktur persampahan pada wilayah regional |

| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan |
|--------|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman | 1 | Meningkatkan kualitas Kawasan permukiman | 1 | Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh melalui pembangunan dan peremajaan terhadap Perumahan atau Permukiman termasuk Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum |
| | | | | 2 | Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru |
| | | | | 3 | Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni melalui bantuan keuangan kepada Kab/Kota |
| | | 2 | Membangun/Meningkatkan Prasarana Permukiman Perkotaan dan Perdesaan yang Terpadu melalui penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman | 1 | Pembangunan/Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan dalam rangka peningkatan cakupan layanan air minum; peningkatan akses air bersih bagi masyarakat agar lebih dekat terutama kaum perempuan sebagai pengguna air terbanyak |
| | | | | 2 | Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Perkotaan yang terintegrasi dengan system jaringan drainase perkotaan dalam rangka penanganan banjir dan genangan |
| | | | | 3 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) di Permukiman perkotaan yang padat penduduk |
| | | | | 4 | Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman untuk konektivitas antar permukiman perdesaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan permukiman perkotaan |
| | | 3 | Menyelenggarakan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Riau | 1 | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Riau |
| | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | 1 | Meningkatkan layanan irigasi pertanian | 1 | Meningkatkan layanan air irigasi pada Kawasan pertanian DI dan DIR Provinsi |
| | | | | 2 | Memelihara Saluran Irigasi agar berfungsi baik |
| | | 2 | Meningkatkan Upaya konservasi Sumber Daya Air | 1 | Meningkatkan Perlindungan daratan dari abrtasi |

| Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan |
|--|---|--|---|---|---|
| | | | | 2 | Meningkatkan Penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir pada SDA kewenangan provinsi |
| MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju <i>world class government</i> . | | | | | |
| Sasaran : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel | | | | | |
| Sub sasaran : Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah | | | | | |
| | | | | | |
| | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang | | Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang | 1 | Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang |
| | | | | 2 | Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peruntukan ruang |
| | | | | 3 | Memfasilitasi penyelesaian sengketa |
| | Meningkatkan Pelayanan Jasa Konstruksi | | Memfasilitasi penggunaan penyedia jasa infrastruktur terhadap publik | 1 | Menyelenggarakan pembinaan penyedia jasa infrastruktur |
| | | | | 2 | Meningkatkan kompetensi penyedia jasa infrastruktur |
| | | | Memfasilitasi pengakuan keahlian SDM penyelenggara konstruksi terhadap publik | 1 | Menyelenggarakan pembinaan SDM penyelenggara konstruksi |
| | | | | 2 | Meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara konstruksi |
| | Meningkatnya kualitas tata kelola sumber daya perangkat daerah pemerintahan | | Menyediakan kebutuhan administrasi pemerintahan | 1 | Menyediakan administrasi kepegawaian |
| | | | | 2 | Menyediakan peralatan kantor |
| | | | | 3 | Menjaga kebersihan dan keamanan kantor |

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut adalah Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Dinas :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Optimalnya fungsi bangunan dan kawasan strategis | Persentase bangunan gedung dan kawasan strategis Provinsi yang berfungsi baik | 100 % |
| 2 | Meningkatnya aksesibilitas jalan | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | 69,27 % |
| 3 | Meningkatnya layanan infrastruktur dasar | Persentase kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang terdistribusi | 100 % |
| 4 | Meningkatnya layanan irigasi pertanian | Indeks Kinerja Sistem Irigasi | 45,21 % |
| 5 | Terlindungnya kawasan permukiman dari daya rusak air | Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air | 6,47 % |
| 6 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Persentase kesesuaian peruntukan ruang | 100 % |
| 7 | Meningkatnya kawasan lingkungan permukiman | Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh provinsi | 61,86 % |
| | | Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU | 100 % |
| 8 | Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi | Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%) | 33,46 % |
| 9 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PUPRPKPP | Nilai SAKIP Dinas PUPRPKPP | 71,3 Poin |

BAB III AKUNTIBILITAS KINERJA

3.1 Definisi Indikator

1. Indikator Satu: Persentase penyelenggaraan bangunan dan Kawasan strategis

Penyelenggaraan bangunan dan Kawasan strategis terdiri dari pembangunan bangunan dan Kawasan strategis, rehabilitasi/pemeliharaan bangunan dan Kawasan strategis, Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, bangunan dan Kawasan strategis adalah bangunan dan lingkungan yang mendukung kepentingan strategis daerah. Data penyelenggaraan bangunan dan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai bobot penyelenggaraan bangunan dan lingkungan strategis

| JENIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN | | PENYELENGGARAAN | | | | | | | | | | | | TARGET 2025 |
|---|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | |
| A | PEMBANGUNAN | 0,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 1,00 | | 4,50 | | 0,00 | | 13 |
| B | PEMELIHARAAN | 3,58 | | 1,25 | | 8,25 | | 0,58 | | 0,33 | | 0,00 | | 14 |
| C | PENATAAN KAWASAN | 0,00 | | 1,00 | | 0,50 | | 3,00 | | 0,50 | | 0,00 | | 4 |
| | TOTAL | 4,08 | 13,16 | 5,75 | 18,55 | 12,25 | 39,52 | 4,58 | 14,77 | 5,33 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 31 |
| | % AKUMULASI | | 13,16 | | 31,71 | | 71,23 | | 86,00 | | 100,00 | | 100,00 | |

Angka target dihitung dari target bobot penyelesaian pertahun.

Tabel 3.2 Target bobot per tahun penyelenggaraan bangunan dan lingkungan strategis

| NO | Jenis Bangunan | Pelaksanaan | | | | | | Keterangan |
|---------------------|--|-------------|------|-------|------|------|------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| PEMBANGUNAN | | | | | | | | |
| 1 | MASJID RAYA PEKANBARU | | √ | | | | | 100% |
| 2 | MASJID AN-NUR | | | | | | | |
| 3 | MASJID RAYA PROVINSI | | √ | | | | | 100% |
| 4 | QUR'AN CENTER | | √ | √ | | | | 100% |
| 5 | RIAU CREATIVE HUB | | √ | √ | | | | |
| 6 | SNVT | | | | | √ | | |
| 7 | GEDUNG OLAHRAGA PETALA BUMI | | | √ | | | | |
| 8 | UPT PERALATAN | | √ | | √ | | | |
| 9 | UPT LABOR | | √ | √ | | | | |
| 10 | UPT I | | | | | √ | | |
| 11 | UPT III | | | | | √ | | |
| 12 | UPT VI | | | | | √ | | |
| 13 | BKD | | | | √ | √ | | |
| 14 | UPT PAM (Mess) | | | √ | | | | 100% |
| REHABILITASI | | | | | | | | |
| 15 | BALAI WARTAWAN NOERBAHRIC YOESOEFF | | | √ | | | | 100% |
| 16 | GOR TRIBUANA | | | √ | | | | 100% |
| 17 | ASRAMA ATLIT SPORT CENTER RUMBAI | | | √ | | | | 100% |
| 18 | HALL SEPAK TAKRAW | | | √ | | | | 100% |
| 19 | GELANGGANG REMAJA | | | √ | | | | 100% |
| 20 | STADION KAHARUDIN NASUTION SPORT CENTER RUMBAI | | | √ | | | | 100% |
| 21 | HALL BELADIRI SPORT CENTER RUMBAI | | | √ | | | | 100% |
| 22 | KOMPLEK GEDUNG KEPEMUDAAN PROVINSI RIAU | | | √ | | | | 100% |
| 23 | Lembaga Adat melayu Riau | | | √ | √ | | | 100% |
| 24 | Anjungan Indragiri Hilir | | | √ | | | | 100% |
| 25 | Kantor Bappedalitbang | | | √ | | | | 100% |
| 26 | KAWASAN MASJID AN-NUR | | | √ | √ | | | |
| 27 | KAWASAN MASJID RAYA SENAPELAN | | | | √ | √ | | |
| 28 | KAWASAN ARIFIN AHMAD | | | | √ | | | |
| 29 | KAWASAN RIAU CREATIVE HUB | | | √ | | | | 100% |
| 30 | KAWASAN TUGU PROKLAMASI | | √ | | | | | |
| 31 | KAWASAN Tanah Samratulangi (Pagar) | | | √ | | | | 100% |
| | BOBOT PERTAHUN | 3,08 | 5,75 | 12,25 | 4,58 | 5,33 | 0 | 31 |

2. Indikator Dua : Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap

Jalan kondisi mantap merupakan proporsi jalan kondisi baik dan kondisi sedang dari total Panjang jalan provinsi kewenangan Provinsi adalah 2.799,81 Km. Sesuai Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011 kondisi jalan terbagi ke ringan dan rusak berat. Formulasi perhitungan jalan mantap adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{panjang ruas jalan kondisi mantap}}{\sum \text{total panjang ruas jalan provinsi}} \times 100\%$$

3. Indikator Tiga : Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota

Indikator ini ditetapkan berdasarkan Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Salah satu SPM Pekerjaan Umum adalah pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota . Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota. Layanan air minum curah lintas Kab/Kota yaitu merupakan pemenuhan kebutuhan kapasitas air minum rumah tangga yang diukur melalui jumlah saluran rumah (SR) yang tersedia. Dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 3.3 Target Pemenuhan Kapasitas layanan air minum

| | | | RENCANA (RISPAM) | | |
|------|------------|-----------|------------------|-------------|--------|
| | | | KAPASITAS | | SR |
| SPAM | DUROLIS | rohil | 100 | liter/detik | 8.000 |
| | | dumai | 150 | liter/detik | 12.000 |
| | | bengkalis | 150 | liter/detik | 12.000 |
| SPAM | Pku-Kampar | pku | 20 | liter/detik | 1.600 |
| | | kampar | 20 | liter/detik | 1.600 |

Secara kapasitas, kebutuhan air minum adalah 440 liter/detik. Jumlah SR yang dibutuhkan 35.200 unit. Layanan air minum merupakan proporsi saluran rumah terpasang terhadap target kebutuhan saluran rumah.

$$= \frac{\sum \text{SR tersambung}}{\sum \text{total target SR pada wilayah layanan}} \times 100\%$$

Target per tahun ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Target persentase layanan air minum s/d 2025

| Sasaran | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Rohil | 4.170 | 4170 | 6170 | 8000 | N/A |
| Dumai | 2.100 | 2100 | 6100 | 12000 | |
| Bengkalis | 7.389 | 7389 | 9389 | 12000 | |
| Kampar | - | 200 | 1600 | 1600 | N/A |
| Pekanbaru | - | 0 | 800 | 1600 | |
| Target SR terlayani | 13.659 | 13.859 | 24.059 | 35.200 | N/A |
| Target SR terlayani | 35.200 | | | | N/A |
| Persentase pelayanan (%) | 38,80 | 39,37 | 68,35 | 100 | 100 |

4. Indikator Empat : Indeks Kinerja sistem Irigasi

Indikator ini menggunakan indikator kinerja kunci outcome yang terdapat pada Permendagri 18 Tahun 2020 urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi merupakan proporsi luas daerah irigasi pertanian fungsional terhadap luas lahan baku pertanian pada daerah irigasi kewenangan.

$$= \frac{\sum \text{luas lahan pertanian fungsional}}{\sum \text{luas lahan baku pertanian}} \times 100\%$$

5. Indikator Lima : Rasio luas kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air

Indikator ini menggunakan indikator kinerja kunci outcome yang terdapat pada Permendagri 18 Tahun 2020 urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Rasio Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air merupakan Rata-rata persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 3.5 Formulasi indikator Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air

| Formulasi |
|--|
| Rata-rata persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air |
| $= \frac{A + B}{2}$ |
| A = Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir |
| $A = \frac{C}{D} \times 100\%$ |
| C = Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha) |
| D = Luas Kawasan Permukiman rawan banjir (Ha) |
| $C = \frac{\sum \square \text{Panjang Pengaman Tebing yang telah dibangun}}{\sum \square \text{Panjang Pengaman Tebing yang dibangun}} \times D$ |
| Panjang Pengaman Tebing yang telah dibangun |
| Panjang Pengaman Tebing yang dibangun |
| B = Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi |
| $B = \frac{E}{F} \times 100\%$ |
| E = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi |
| F = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi |

6. Indikator Enam : Persentase kesesuaian peruntukan ruang

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah terdiri dari 5 kriteria aspek penilaian yaitu :

- a. Pengaturan penataan ruang
- b. Pembinaan penataan runag
- c. Perencanaan tata ruang
- d. Pemanfaatan ruang

e. Pengendalian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian peruntukan ruang dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Kab/Kota yang telah selesai RTRW}}{\Sigma \text{ Kab/Kota yang telah selesai}} \times 100\%$$

7. Indikator Tujuh : Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani.

Indikator Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani merupakan proporsi luasan Kawasan kumuh yang ditangani terhadap total luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi. Formulasinya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\Sigma \text{ luasan permukiman kumuh yang tertangani sampai dengan tahun penanganan}}{\Sigma \text{ luas pemukiman kumuh kewenangan Provinsi}} \times 100\%$$

8. Indikator Delapan : Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Indikator ini menggunakan indikator kinerja kunci outcome yang terdapat pada Permendagri 18 Tahun 2020

$$= \frac{\Sigma \text{ jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\Sigma \text{ jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

9. Indikator Sembilan : Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)

Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi merupakan proporsi tenaga ahli yang disediakan terhadap kebutuhan tenaga ahli konstruksi di Provinsi Riau. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\Sigma \text{ jumlah tenaga ahli yang telah disertifikasi}}{\Sigma \text{ jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi Provinsi Riau}} \times 100\%$$

10. Indikator Sepuluh : Nilai SAKIP Dinas PUPRPKPP

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun-n merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur dari Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan Gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada. Skala Nilai perangkat Kinerja dapat ditentukan dari table 3.8 berikut :

Table 3.6 Skala Nilai perangkat Kinerja

| No | Interval nilai realisasi kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $91 \leq 100$ | Sangat Tinggi |
| 2 | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3 | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4 | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut :

III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dari baseline tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Kinerja Tahun | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun | |
|------|--|---|------------|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | |
| (01) | | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | |
| 1 | Optimalnya fungsi bangunan dan kawasan strategis | Persentase bangunan gedung dan kawasan strategis Provinsi yang berfungsi baik | Persentase | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |
| 2 | Meningkatnya aksesibilitas jalan | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | Persentase | 66,35 | 69,81 | 71,61 | 73,41 | 75,31 | 77,21 | 80,01 | 80,01 | 62,61 |
| 3 | Meningkatnya layanan infrastruktur dasar | Persentase kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang terdistribusi | Persentase | 8,58 | 8,58 | 19,94 | 34,14 | 48,35 | 59,71 | 65,39 | 65,39 | 0 |
| 4 | Meningkatnya layanan irigasi pertanian | Indeks Kinerja Sistem Irigasi | Persentase | 17,00 | 17,84 | 20,43 | 23,44 | 26,72 | 30,29 | 33,99 | 33,99 | 17 |

| No | SASARAN STRATEGIS | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Kinerja Tahun | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun |
|----|---|---|------------|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 |
| 5 | Terlindunginya kawasan permukiman dari daya rusak air | Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air | Persentase | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,55 |
| 6 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Persentase kesesuaian peruntukan ruang | Persentase | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,67 |
| 7 | Meningkatnya kawasan lingkungan permukiman | Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh provinsi | Persentase | 41,25 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0 |
| | | Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU provinsi | Persentase | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 8 | Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi | Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%) | Persentase | 37,25 | 45,21 | 49,32 | 51,78 | 54,25 | 56,71 | 59,18 | 48,42 |
| 9 | Meningkatnya akuntabilitas | Nilai SAKIP Dinas PUPRPKPP | Poin | 71,80 | 72,50 | 73,20 | 73,90 | 74,60 | 75,30 | 76,00 | 69,75 |

| No | SASARAN STRATEGIS | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Kinerja Tahun | | | | | | Realisasi Kinerja Tahun | |
|----|------------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|------|------|------|------|------|-------------------------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | 2025 |
| | kinerja Dinas PUPRPKPP | | | | | | | | | | | |

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 hampir mencapai target namun ada yang tertunda akibat pengalihan anggaran dan tunda bayar. Dari tabel di atas, perbandingan capaian setiap tahunnya dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut :

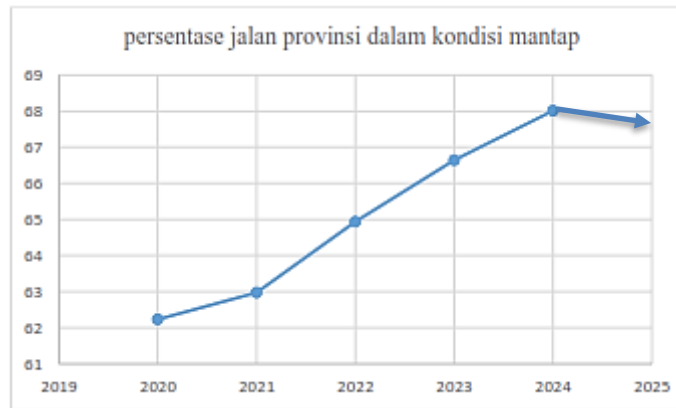
1. Indikator Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi



Gambar 1 Grafik Capaian Indikator 1

Capaian indikator ini meningkat signifikan dari Tahun 2024-2025, memperlihatkan penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis provinsi Riau yang tertahan ditahun 2025 karena pengalihan anggaran dan tunda bayar

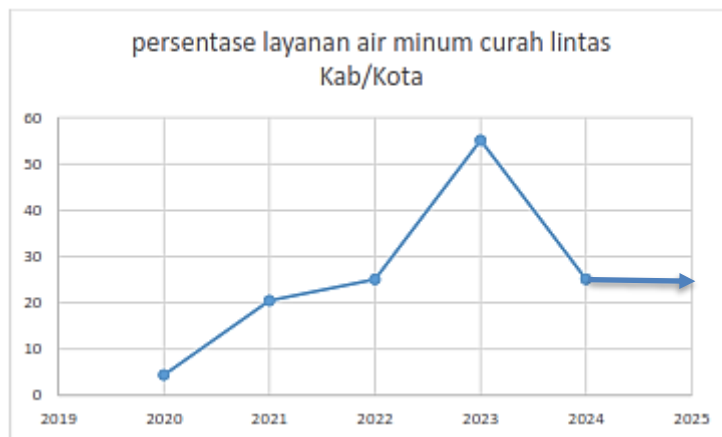
2. Indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap



Gambar 2 Grafik Capaian Indikator 2

Capaian indikator ini meningkat signifikan dari Tahun 2024-2025, memperlihatkan penyelenggaraan jalan provinsi Riau yang tertahan ditahun 2025 karena pengalihan anggaran dan tunda bayar

3. Persentase kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang terdistribusi



Gambar 3 Grafik Capaian Indikator 3

4. Indeks Kinerja Sistem Irigasi



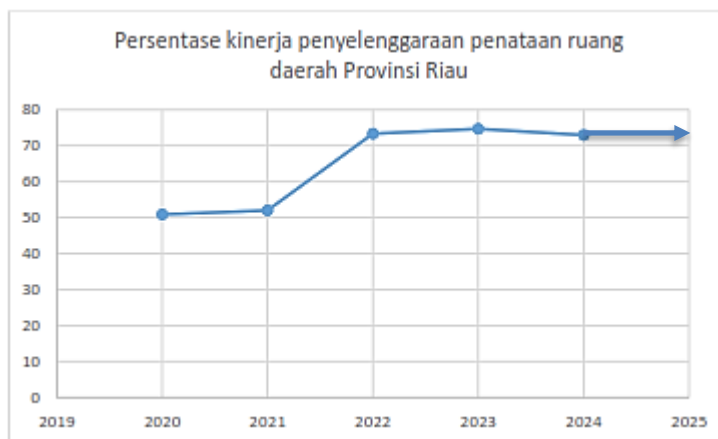
Gambar 4 Grafik Capaian Indikator 4

5. Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air



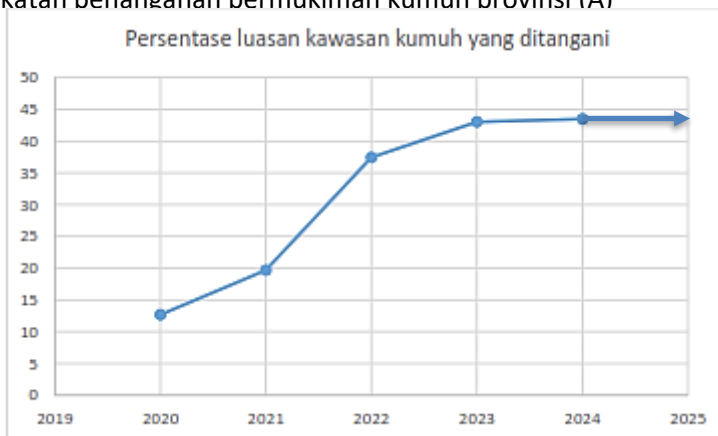
Gambar 5 Grafik Capaian Indikator 5

6. Persentase kesesuaian peruntukan ruang



Gambar 6 Grafik Capaian Indikator 6

7. Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh provinsi (A)



Gambar 7A Grafik Capaian Indikator 7A

Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU provinsi (B)



Gambar 7B Grafik Capaian Indikator 7B

8. pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi (%)



Gambar 8 Grafik Capaian Indikator 8

Rata-rata, kinerja Dinas PUPRPKPP mengalami peningkatan, kecuali kinerja layanan yang mengalami pergeseran tunda bayar saat ini karena keterbatasan kemampuan penyediaan anggaran.

III.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Capaian kinerja tahun 2025

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM DINAS PUPRPKPP PROVINSI RIAU TAHUN 2025

| NO | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA 2025 | | TARGET KINERJA PERUBAHAN 2025 | | CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN 2025 | | |
|----|--|---------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------|
| | | Kinerja | Kinerja | Kinerja | Kinerja | Kinerja | % | % |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | 75,11 | Nilai | 75,11 | Nilai | N/A | Nilai | N/A |
| 2 | Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota | 8,58 | % | 8,58 | % | 0,00 | % | 0,00 |
| 3 | Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dan Akses dan Banjir Rob | 1,41 | Persentase | 1,41 | Persentase | 1,38 | Persentase | 97,87 |
| 4 | Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi | 100,00 | Persentase | 100,00 | Persentase | 100,00 | Persentase | 100,00 |
| 5 | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 100,00 | Persentase | 100,00 | Persentase | 0,00 | Persentase | 0,00 |
| 6 | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | 0,57 | Persentase | 0,57 | Persentase | 0,55 | Persentase | 96,49 |
| 7 | Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani | 0,00 | Persentase | 0,00 | Persentase | 0,00 | Persentase | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|
| 8 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | 100,00 | % | 100,00 | % | 74,80 | % | 74,80 |
| 9 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | 17,84 | Persentase | 17,84 | Persentase | 17,00 | Persentase | 95,29 |
| 10 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 72,50 | Poin | 72,50 | Poin | 69,75 | Poin | 96,21 |
| 11 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | 86,74 | Persentase | 86,74 | Persentase | 86,32 | Persentase | 99,52 |
| 12 | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 |
| 13 | Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi | 45,21 | Persentase | 45,21 | Persentase | 48,42 | Persentase | 107,10 |
| 14 | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 |
| 15 | Persentase kinerja penyelesaian penataan ruang daerah Provinsi Riau | 91,67 | Persentase | 91,67 | Persentase | 91,67 | Persentase | 100,00 |
| 16 | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | 69,81 | Persentase | 69,81 | Persentase | 62,61 | Persentase | 89,69 |

Target perjanjian kinerja sama persis dengan target Renstra karena target Renstra sudah mengalami perubahan pada dokumen perubahan renstra sehingga target perjanjian kinerja tidak perlu mengalami penyesuaian. Oleh karena itu capaian perjanjian kinerja dengan capaian target renstra sama. Rata-rata capaian kinerja hampir mencapai target.

III.1.3. Rekap luas dan jumlah Kawasan Kumuh di Provinsi Riau

Tabel 3.9 REKAP LUAS DAN JUMLAH KAWASAN KUMUH DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN RPJMD 2025 -2029

| No | Kab/Kota | Luas Kawasan Berdasarkan Kewenangan | | | | Jumlah Kawasan Berdasarkan Kewenangan | | | | Sumber / Dasar |
|----|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| | | Kab/Kota < 10 ha | Provinsi 10-15 ha | Pusat > 15 ha | Total Se-Provinsi | Kab/Kota < 10 ha | Provinsi 10-15 ha | Pusat > 15 ha | Total Se-Provinsi | |
| 1 | Kab. Kuantan Singingi | 22,42 | 11,30 | - | 33,72 | 4 | 1 | - | 5 | Kpts.421/XI/2014 tgl 19 Sept 2014 |
| 2 | Kab. Indragiri Hulu | 19,54 | 42,15 | 75,97 | 137,66 | 2 | 3 | 3 | 8 | 167/III/2017 tgl 3 Maret 2017 |
| 3 | Kab. Indragiri Hilir | 24,38 | 24,94 | 126,94 | 176,26 | 4 | 2 | 5 | 11 | Kpts.133/II/HK-2017 tgl 23 Feb 2017 |
| 4 | Kab. Pelalawan | 7,46 | - | 51,76 | 59,22 | 2 | - | 3 | 5 | KPTS.050/BAPPEDA/757/2014 tgl 25 Agt 2014 |
| 5 | Kab. Siak | 5,63 | 12,04 | 155,19 | 172,86 | 1 | 1 | 5 | 7 | 303/HK/KPTS/2017 tgl 23 Feb 2017 |
| 6 | Kab. Kampar | 8,96 | - | 61,57 | 70,53 | 1 | - | 3 | 4 | 650/bappeda-kimp/2016/100 tgl 3 Okt 2016 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| 7 | Kab. Rokan Hulu | 46,84 | 33,05 | 102,64 | 182,53 | 9 | 3 | 3 | 15 | Kpts.050.13/BAPPEDA/49/2017 tgl 31 Jan 2017 |
| 8 | Kab. Bengkalis | 27,8 | 36,15 | 116,38 | 180,33 | 4 | 3 | 5 | 12 | 341/KPTS/X/2014 tgl 15 Okt 2014 |
| 9 | Kab. Rokan Hilir | 4,57 | - | 130,26 | 134,83 | 2 | - | 4 | 6 | 658 tahun 2014 tgl 21 Juli 2014 |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 87,09 | 39,80 | 45,3 | 172,19 | 61 | 3 | 1 | 65 | 322/HK/KPTS/II/2019 tgl 21 Okt 2019 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 8,4 | 27,60 | 77,56 | 113,56 | 2 | 2 | 4 | 8 | 878 Tahun 2017 tgl 29 Des 2017 |
| 12 | Kota Dumai | 23,6 | 22,24 | 82,21 | 128,05 | 4 | 2 | 4 | 10 | 448/BAPPEDA/2015 tgl 22 Nov 2015 |
| Total | | 286,69 | 249,27 | 1025,78 | 1561,74 | 96 | 20 | 40 | 156 | |

III.1.4. Rekap SubKegiatan yang mendukung indikator kegiatan utama

Tabel 3.10 SubKegiatan yang mendukung indikator kegiatan utama

| | Sub Kegiatan | Indikator Sub kegiatan | Target |
|----|---|--|-----------|
| 1 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 130 KM |
| 2 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen |
| 3 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | 3 Lembaga |
| 4 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen |
| 5 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | 2 dokumen |
| 6 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | 1 dokumen |
| 7 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 7 dokumen |
| 8 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa | Jumlah Daerah Irigasi Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan | 11 DI |
| 9 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi | 1,047 KM |
| 10 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi | 17,6 km |
| 11 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 797.8 KM |

| | | | |
|----|--|--|-------------------|
| 12 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1241,9 KM |
| 13 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 13 Dokumen |
| 14 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 3 Dokumen |
| 15 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen |
| 16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | 1 dokumen |
| 17 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 3 dokumen |
| 18 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 2 Bangunan Gedung |
| 19 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 1 kawasan |
| 20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala | 1 Jembatan |
| 21 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang direkonstruksi | 26,19 KM |
| 22 | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang dibangun | 1 jembatan |

| | | | |
|----|--|---|------------------------|
| 23 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur | 1,35 KM |
| 24 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 2 dokumen |
| 25 | Pembangunan Jalan | Panjang jalan yang dibangun | 9 km |
| 26 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 2693,87 KM |
| 27 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih | 300 orang |
| 28 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | 30 Lembaga |
| 29 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi | 300 Orang |
| 30 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan | 9 Dokumen |
| 31 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 12 Paket Pekerjaan |
| 32 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | 12 Bangunan Konstruksi |
| 33 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 12 Lembaga |

| | | | |
|----|---|---|----------------|
| 34 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha | 20 Badan Usaha |
| 35 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi | 1 Dokumen |
| 36 | Penetapan RTRW Provinsi | Jumlah Perda RTRW Provinsi | 1 dokumen |
| 37 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | 48 Orang |
| 38 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 58 Orang |
| 39 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen |
| 40 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota | Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari | 1 Dokumen |
| 41 | Penyusunan Peta Dasar | Jumlah data SHP Peta Dasar | 3 Peta |
| 42 | Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota | 6 Berita Acara |
| 43 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | 1 laporan |
| 44 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 1 Dokumen |
| 45 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | 1 Dokumen |
| 46 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen |
| 47 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | 1 Dokumen |
| 48 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | 1 Laporan |

| | | | |
|----|--|---|----------------|
| 49 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun | 11 Unit Rumah |
| 50 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena relokasi Program Provinsi | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | 11 Unit Rumah |
| 51 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar | 70 Ha |
| 52 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman | 12 Lokasi |
| 53 | Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah | 2 Dokumen |
| 54 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan |
| 55 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. | 1 Berita Acara |
| 56 | Rehabilitasi Jembatan (UPT1) | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 2 Jembatan |
| 57 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 5 Jembatan |
| 58 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 4,39 KM |
| 59 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 181,82 KM |
| 60 | Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPT2) | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 1 Jembatan |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| 61 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 2 KM |
| 62 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 22 KM |
| 63 | Rehabilitasi Jembatan (UPT3) | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 1 Jembatan |
| 64 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 1 Jembatan |
| 65 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 2 KM |
| 66 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 22 KM |
| 67 | Rehabilitasi Jembatan (UPT4) | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 2 Jembatan |
| 68 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 2 Jembatan |
| 69 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 0,2 KM |
| 70 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 10 KM |
| 71 | Rehabilitasi Jembatan (UPT5) | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 1 Jembatan |
| 72 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 3 Jembatan |
| 73 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 1 KM |
| 74 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 22,13 KM |
| 75 | Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPT6) | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 5 Jembatan |
| 76 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 1.60 KM |
| 77 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 80 KM |
| 78 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara | 2 Unit |

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

faktor pendorong/penyebab, hambatan, dan solusi/tindak lanjut Tahun Anggaran 2026.

Sasaran Strategis

Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis

Tabel 3.11 Faktor pendorong/penyebab, hambatan, dan solusi/tindak lanjut Tahun Anggaran 2026

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penyebab | Dampak |
|----|--|--|--|--|
| | | | Uraian | Uraian |
| a | b | c | d | j |
| | Tujuan Strategis | | | |
| | Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | | | |
| | Sasaran Strategis | | | |
| | Terselenggaranya dan tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis | Persentase penyelenggaraan bangunan dan kawasan strategis Provinsi | Kurangnya efektifitas pelayanan umum dan pemerintahan | Tidak tercapainya kinerja yang sudah ditetapkan |
| | Meningkatnya aksesibilitas jalan | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap | Terdapatnya jalan Provinsi dengan kondisi kerusakan ringan sampai rusak berat yang menyebabkan jalan sulit diakses | 1. Jalan cepat rusak 2. Penanganan jalan tidak tuntas (tidak efisien) 3. Peningkatan terjadinya kecelakaan lalulintas (Lakalantas) |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase layanan air minum curah lintas Kab/Kota; - Persentase perencanaan SPALD; - Persentase Luas lahan TPA yang terbangun. | Kualitas kesehatan dan lingkungan kurang baik | Evaluasi dilakukan terbatas pada output dan Metode mengidentifikasi pemantauan dan evaluasi yang tidak tepat |
| | Meningkatnya pengelolaan sumber daya air | Rasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air | Pemeliharaan jaringan irigasi yang tidak maksimal | Daerah irigasi yang belum teraliri dengan baik |
| | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi Riau | Kurang tertatanya kawasan wilayah untuk menunjang kinerja pemerintah dan umum | Tidak tercapainya kinerja yang sudah ditetapkan |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani; - Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | Kurang tercapai kualitas lingkungan dan permukiman yang memenuhi syarat standar lingkungan sehat | Reputasi buruk terhadap OPD dan Pemerintah daerah |
| | Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi | Rasio pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi | Kurang tercapainya SDM bidang konstruksi | Keterlambatan/Dokumen tidak lengkap/Gagal |

3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran per program/kegiatan/subkegiatan TA 2025 serta analisis efisiensi dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut :

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|---|--|--------------------|--|--------|-------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | |
| | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU | | 1.317.243.965.752.640,00 | | | | | | |
| 1 | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | 96,57 | 234.395.796.422,00 | 96,57 | 109,81 | | | |
| SEKRETARIAT | | | | | | | | 15,06 | 35.304.983.925,00 | | 16,54 | SEKRETARIAT | | |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|--|---|--|--------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 103,09 | 199.090.812.497,00 | 10,97 | 123,90 | | | |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 103,09 | 199.090.812.497,00 | 0,86 | 123,90 | | | |
| 2 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|---|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 2 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 3 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 77,47 | 4.889.201.384,00 | 645,58 | 46,34 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan | 15,12 | 56.935.944,00 | 24,39 | 7,59 | | | |
| 4 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 95,40 | 2.222.210.220,00 | 43,76 | 72,86 | | | |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik yang disediakan | 83,39 | 1.512.745.100,00 | 6,95 | 53,08 | | | |
| 6 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan | #DIV/0! | 82.525.950,00 | #DIV/0! | 7,86 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|----------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar | 86,06 | 523.518.150,00 | 30,73 | 19,94 | | | |
| 8 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 99,45 | 491.266.020,00 | 4.972,31 | 218,34 | | | |
| 4 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 39,28 | 699.577.500,00 | 490,98 | 14,73 | | | |
| 9 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 30,46 | 373.459.500,00 | 56,41 | 9,11 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|-------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 58,75 | 326.118.000,00 | 1.468,75 | 50,17 | | | |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 81,28 | 24.149.429.708,00 | 1.354,63 | 78,86 | | | |
| 14 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 62,50 | 50.000.000,00 | 260,42 | 74,63 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|-------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 77,94 | 7.081.090.432,00 | 324,75 | 83,25 | | | |
| 13 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 82,86 | 17.018.339.276,00 | 345,23 | 77,18 | | | |
| 6 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 53,68 | 5.566.775.333,00 | 2,33 | 105,03 | | | |
| 15 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|-------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 42,89 | 1.088.476.037,00 | 43,76 | 75,07 | | | |
| 16 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 26,29 | 969.099.656,00 | 2,42 | 58,73 | | | |
| 17 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 88,35 | 2.912.435.112,00 | 2.208,78 | 182,03 | | | |
| 18 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00 | 596.764.528,00 | 5.000,00 | 149,19 | | | |
| | | | | | | UPT. PERALATAN KONSTRUKSI | | 0,00 | 11.515.244.470,00 | - | 26,07 | | | |
| 8 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 19,93 | 108.536.350,00 | 249,12 | 8,45 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|----------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 99,27 | 66.177.600,00 | 165,45 | 62,70 | | | |
| 22 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 26,63 | 10.420.000,00 | 25,61 | 14,52 | | | |
| 22 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 17,27 | 1.440.000,00 | 287,77 | 12,89 | | | |
| 24 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7,39 | 30.498.750,00 | 2,89 | 2,78 | | | |
| 9 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan | 34,28 | 340.437.000,00 | 137,13 | 1,23 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0003 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 25 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 34,28 | 340.437.000,00 | 19,59 | 20,80 | | | |
| 10 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 69,66 | 2.172.084.025,00 | 1.741,60 | 71,05 | | | |
| 26 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 78,26 | 481.223.197,00 | 326,06 | 72,54 | | | |
| 27 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 23,07 | 1.195.068.017,00 | 96,12 | 49,93 | | | |
| 11 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 61,22 | 8.894.187.095,00 | 38,26 | 72,58 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 55,92 | 101.596.503,00 | 2.796,15 | 75,68 | | | |
| 29 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 69,71 | 8.618.896.092,00 | 45,86 | 84,39 | | | |
| 30 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 11,71 | 173.694.500,00 | 585,53 | 9,10 | | | |
| | | | | | | UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | | 0,00 | 5.258.865.717,00 | - | 68,53 | | | |
| 12 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 76,59 | 1.280.984.906,00 | 638,28 | 33,36 | | | |
| 31 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 65,00 | 23.175.998,00 | 361,09 | 73,98 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|--|---|--|----------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 86,69 | 274.845.423,00 | 67,73 | 72,32 | | | |
| 33 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20,37 | 65.408.000,00 | 8,86 | 20,60 | | | |
| 34 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 99,96 | 22.411.532,00 | 99,64 | 87,94 | | | |
| 35 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 93,18 | 878.101.953,00 | 33,04 | 37,97 | | | |
| 37 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 13 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan | 58,59 | 580.410.780,00 | 234,37 | 58,94 | | | |
| 38 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|---|--|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 99,97 | 580.410.780,00 | 6,34 | 98,71 | | | |
| 14 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 89,28 | 3.158.324.987,00 | 223,20 | 320,73 | | | |
| 40 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 77,56 | 471.659.571,00 | 32,32 | 118,89 | | | |
| 41 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 91,89 | 2.686.665.416,00 | 38,29 | 456,92 | | | |
| 15 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 15,66 | 239.145.044,00 | 0,68 | 12,83 | | | |
| 42 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 66,60 | 183.455.044,00 | 23,13 | 115,53 | | | |
| 43 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8,10 | 55.690.000,00 | 0,49 | 4,50 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 16 | 1 | 03 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 45 | 1 | 03 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM | | 0,00 | 5.291.837.448,00 | | 67,95 | | | |
| 17 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 46,80 | 180.489.290,00 | 585,06 | 17,47 | | | |
| 46 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 76,10 | 79.051.790,00 | 120,79 | 39,77 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 14,98 | 7.590.000,00 | 12,59 | 9,23 | | | |
| 48 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 49 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 43,00 | 93.847.500,00 | 17,99 | 13,26 | | | |
| 18 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan | 100,00 | 142.430.000,00 | 5.000,00 | 71,22 | | | |
| 50 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100,00 | 142.430.000,00 | 25,00 | 71,22 | | | |
| 19 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 81,26 | 4.635.747.658,00 | 172,00 | 86,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 90,16 | 429.446.374,00 | 189,53 | 94,76 | | | |
| 53 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 80,41 | 4.206.301.284,00 | 170,39 | 85,19 | | | |
| 20 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 36,88 | 333.170.500,00 | 51,22 | 28,63 | | | |
| 54 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 52,11 | 159.040.000,00 | 79,52 | 39,76 | | | |
| 55 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 42,39 | #REF! | #REF! | #REF! | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 29,41 | 129.406.500,00 | 37,79 | 18,89 | | | |
| 16 | 1 | 03 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 45 | 1 | 03 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I | | | | | | | | 0,00 | 2.800.574.042,00 | - | 57,42 | | | |
| 21 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 38,09 | 193.301.750,00 | 380,92 | 11,90 | | | |
| 57 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00 | 14.625.000,00 | 100,00 | 150,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 99,01 | 54.426.750,00 | 112,51 | 73,34 | | | |
| 59 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 21,74 | 13.200.000,00 | 16,98 | 14,95 | | | |
| 60 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 98,97 | 30.680.000,00 | 2.474,19 | 24,74 | | | |
| 61 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 18,15 | 80.370.000,00 | 2,06 | 6,05 | | | |
| 22 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan | 22,12 | 35.625.000,00 | 1.106,21 | 19,57 | | | |
| 63 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0,00 | 35.625.000,00 | - | 19,57 | | | |
| 23 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 73,61 | 1.676.784.320,00 | 158,37 | 79,19 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 82,66 | 57.286.000,00 | 344,41 | 83,69 | | | |
| 64 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 73,28 | 1.619.498.320,00 | 158,07 | 79,04 | | | |
| 24 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 79,99 | 894.862.972,00 | 196,12 | 93,94 | | | |
| 65 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 97,05 | 560.714.622,00 | 218,79 | 109,39 | | | |
| 66 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16,02 | 34.148.350,00 | 34,15 | 10,04 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00 | 300.000.000,00 | 300,00 | 150,00 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II | | | | | | | | 0,00 | 2.729.522.691,00 | | 40,33 | | | |
| 25 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 53,12 | 214.376.905,00 | 35,09 | 8,40 | | | |
| 67 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00 | 13.750.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | |
| 68 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 99,57 | 161.626.905,00 | 84,38 | 72,17 | | | |
| 69 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 70 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00 | 39.000.000,00 | 148,57 | 22,29 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 26 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan | 99,86 | 174.849.000,00 | 299,58 | 96,05 | | | |
| 72 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 99,86 | 174.849.000,00 | 6,34 | 96,05 | | | |
| 26 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 73,59 | 1.560.210.980,00 | 133,30 | 57,01 | | | |
| 72 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 38,60 | 101.350.980,00 | 81,92 | 40,96 | | | |
| 73 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 79,34 | 1.458.860.000,00 | 139,37 | 58,61 | | | |
| 27 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 78,83 | 954.934.806,00 | 91,66 | 73,54 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 98,13 | 879.304.806,00 | 245,31 | 87,61 | | | |
| 75 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 97,36 | 75.630.000,00 | 221,28 | 137,92 | | | |
| 76 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III | | | | | | | | 0,00 | 1.629.479.405,00 | 106,53 | 45,13 | | | |
| 28 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 28,72 | 124.031.621,00 | 35,90 | 17,95 | | | |
| 77 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 22,88 | 4.200.000,00 | 300,00 | 150,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 53,56 | 63.386.621,00 | 76,51 | 44,48 | | | |
| 79 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 80 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 81 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19,81 | 56.445.000,00 | 14,15 | 11,04 | | | |
| 29 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 82 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 29 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 91,23 | 1.006.420.588,00 | 186,66 | 63,56 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|--|---|--|----------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 47,93 | 22.898.900,00 | 78,74 | 21,58 | | | |
| 83 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 93,22 | 983.521.688,00 | 192,81 | 66,58 | | | |
| 30 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 42,74 | 499.027.196,00 | 35,61 | 37,35 | | | |
| 84 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 36,06 | 320.511.541,00 | 86,94 | 60,27 | | | |
| 85 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 42,39 | 5.683.223,00 | 62,04 | 1,46 | | | |
| 86 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 71,41 | 172.832.432,00 | 200,97 | 41,62 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|----------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 41,53 | 137.959.347,00 | 415,25 | 12,89 | | | |
| 87 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 82,86 | 18.690.000,00 | 190,71 | 90,73 | | | |
| 88 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 98,99 | 77.618.687,00 | 76,74 | 35,58 | | | |
| 89 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 90 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00 | 4.045.660,00 | 3,33 | 44,39 | | | |
| 91 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15,08 | 37.605.000,00 | 9,19 | 4,63 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 95,67 | 1.228.855.564,00 | 199,32 | 80,60 | | | |
| 93 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 76,66 | 60.017.740,00 | 175,90 | 85,59 | | | |
| 94 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 96,88 | 1.168.837.824,00 | 160,71 | 80,36 | | | |
| 34 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 62,72 | 1.004.792.796,00 | 52,27 | 75,21 | | | |
| 95 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35,95 | 157.847.029,00 | 138,29 | 29,68 | | | |
| 96 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 55,25 | 243.930.767,00 | 60,06 | 62,71 | | | |
| 97 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 97,41 | 603.015.000,00 | 291,14 | 145,22 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V | | | | | | | | 0,00 | 2.051.787.762,00 | 148,22 | 74,10 | | | |
| 35 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 72,89 | 213.471.558,00 | 728,85 | 25,51 | | | |
| 98 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 98,35 | 20.880.000,00 | 229,96 | 114,98 | | | |
| 99 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 92,63 | 108.309.008,00 | 63,45 | 43,55 | | | |
| 100 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 101 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 81,36 | 15.767.550,00 | 85,45 | 42,73 | | | |
| 102 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50,17 | 68.515.000,00 | 31,35 | 13,16 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan | 97,17 | 166.250.000,00 | 233,06 | 116,53 | | | |
| 103 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 97,17 | 166.250.000,00 | 233,06 | 116,53 | | | |
| 37 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 89,26 | 1.208.368.500,00 | 180,98 | 90,49 | | | |
| 104 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 64,97 | 38.699.100,00 | 121,60 | 60,80 | | | |
| 105 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 90,46 | 1.169.669.400,00 | 183,96 | 91,98 | | | |
| 38 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 67,12 | 463.697.704,00 | 74,58 | 102,18 | | | |
| 106 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 42,64 | 119.735.529,00 | 14,81 | 31,15 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | |
| 107 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 87,96 | 343.962.175,00 | 5,30 | 495,34 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI | | | | | | | | 0,00 | 1.912.009.929,00 | | 30,94 | | | |
| 39 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 22,99 | 173.737.622,00 | 229,94 | 4,59 | | | |
| 108 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 57,89 | 11.700.000,00 | 96,49 | 0,43 | | | |
| 109 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24,21 | 104.581.622,00 | 18,77 | 29,19 | | | |
| 110 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15,00 | 3.726.000,00 | 31,25 | 11,25 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|---|--|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 66,40 | 24.450.000,00 | 2,21 | 32,60 | | | |
| 112 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 9,88 | 29.280.000,00 | 6,02 | 4,76 | | | |
| 40 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 84,94 | 1.306.896.932,00 | 179,39 | 81,69 | | | |
| 113 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 26,11 | 18.141.000,00 | 108,78 | 25,20 | | | |
| 114 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 88,21 | 1.288.755.932,00 | 186,10 | 84,35 | | | |
| 41 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 41,37 | 431.375.375,00 | 34,47 | 54,01 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|--------------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32,75 | 274.375.375,00 | 86,63 | 43,32 | | | |
| 116 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 55,56 | 7.000.000,00 | 60,39 | 27,78 | | | |
| 117 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 83,33 | 150.000.000,00 | 250,00 | 107,14 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | 96,57 | 234.395.796.422,00 | 96,57 | 109,81 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | |
| 2 | 1 | 03 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1. Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik 2. Luas Kawasan Yang Terlindungi Daya Rusak Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | BIDANG SUMBER DAYA AIR | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola | 22,22 | 6.655.071.944,00 | 0,00 | 6,48 | | | |
| 119 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0009 | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang dibangun | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | | | |
| 121 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 14,78 | 3.870.378.833,00 | 11,82 | 12,90 | | | |
| 122 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0082 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 100,00 | 99.456.000,00 | 8.333,33 | 1,66 | | | |
| 122 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0087 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 124 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0090 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|----------------|--|------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0096 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | 100,00 | 713.458.494,00 | 20.000,00 | 3,37 | | | |
| 125 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0101 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | | | | | | | | |
| 124 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0123 | Pembangunan Unit Air Baku | Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 124 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0103 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 100,00 | 337.700.409,00 | 1.000,00 | 8,44 | | | |
| 120 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0117 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi Disusun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 126 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0119 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|------------------|--|-------|-------------------------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai yang Disusun | 56,80 | 830.945.088,00 | 946,65 | 15,83 | | | |
| | | | | | | | Luas daerah irigasi fungsional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | BIDANG SUMBER DAYA AIR | | 0,00 | 0,00 | | | BIDANG SUMBER DAYA AIR | | |
| 42 | 1 | 03 | 2 | 1.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik | 7,32 | 1.069.547.050,00 | 0,69 | 0,71 | | | |
| 125 | 1 | 03 | 2 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | | | |
| 125 | 1 | 03 | 2 | 1.02 | 0004 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 100,00 | 99.977.700,00 | 0,00 | 0,42 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 1 | 03 | 2 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi | 80,33 | 969.569.350,00 | 43,66 | 2,09 | | | |
| 126 | 1 | 03 | 2 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | | | |
| 127 | 1 | 03 | 2 | 1.02 | 0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 128 | 1 | 03 | 2 | 1.02 | 0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Irigasi dan Rawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 130 | 1 | 03 | 2 | 1 | 0039 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa | Jumlah Daerah Irigasi Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang didistribusikan | 2,62 | 451.093.730,00 | 0,60 | 1,31 | | | |
| | | | | | | BIDANG CIPTA KARYA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 43 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang didistribusikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 133 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0014 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 133 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 133 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0020 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM | | | | | | | | 1,00 | 6.381.978.044,00 | 0,00 | 39,89 | | | |
| 134 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara | 41,96 | 5.673.325.914,00 | 1.049,07 | 35,46 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | | 2,62 | 451.093.730,00 | 0,60 | 1,31 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| 4 | 1 | 03 | 4 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase penyediaan sarana persampahan regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| BIDANG CIPTA KARYA | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 44 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase penyediaan sarana persampahan regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|---|--|---------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0009 | Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 136 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0012 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 136 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| 5 | 1 | 03 | 5 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | BIDANG CIPTA KARYA | | | | | | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|---------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 137 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0010 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 138 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| 5 | 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Penyediaan Sarana Drainase | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | BIDANG CIPTA KARYA | | | | | | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|---------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1 | 03 | 06 | 1.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | Persentase Penyediaan Sarana Drainase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 138 | 1 | 03 | 06 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| 6 | 1 | 03 | 8 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung Strategis Yang Dibangun Dan Dipelihara | 37,095607 | 1,43421E+11 | 37,0956067 | 271,5717745 | | | |
| BIDANG CIPTA KARYA | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|--------------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1 | 36 | 08 | 1.01 | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah bangunan strategis yang dibangun dan dipelihara | 37,10 | 143.420.921.607,00 | 529,94 | 271,57 | | | |
| 139 | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 32,71 | 121.350.195.233,00 | 3.270,85 | 348,59 | | | |
| 140 | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0020 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 77,48 | 22.070.726.374,00 | 1.291,31 | 122,62 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | 37,10 | 143.420.921.607,00 | 37,10 | 271,57 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|---|---|--|-------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 03 | 9 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Kawasan Strategis Yang Ditata | 39,88 | 13.414.375.640,00 | 39,88 | 48,60 | | | |
| | | | | | | BIDANG Cipta Karya | | 0,00 | | | | | | |
| 47 | 1 | 03 | 9 | 1.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kawasan yang ditata | 39,88 | 13.414.375.640,00 | 1.994,21 | 48,60 | | | |
| 141 | 1 | 03 | 9 | 1.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 39,88 | 13.414.375.640,00 | 1.994,21 | 53,66 | | | |
| 142 | 1 | 03 | 9 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 142 | 1 | 03 | 9 | 1.01 | 0012 | Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|---|--|--------------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | | 39,88 | 13.414.375.640,00 | 39,88 | 48,60 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| 8 | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap | 30,09 | 203.951.651.007,00 | 19,09 | 19,97 | | | |
| 48 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | panjang jalan yang diselenggarakan | 30,09 | 203.951.651.007,00 | 4,19 | 19,97 | | | |
| | | | | | | BIDANG BINA MARGA | | 0,00 | 203.951.651.007,00 | | 23,29 | | | |
| 48 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | panjang jalan yang diselenggarakan | 30,09 | 203.951.651.007,00 | 46,49 | 23,29 | | | |
| 144 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0027 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala | 15,33 | 6.951.794.693,00 | 766,49 | 11,11 | | | |
| 146 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0031 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 34,39 | 112.024.372.665,00 | 112,76 | 33,17 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|-------------------|--|-------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan) | 50,08 | 38.804.356.600,00 | 2.503,84 | 36,76 | | | |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0035 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM) | 100,00 | 2.514.822.725,00 | 3.333,33 | 4,31 | | | |
| | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) | 4,28 | 861.270.407,00 | 61,09 | 11,23 | | | |
| 144 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 20,26 | 40.780.385.015,00 | 64,89 | 13,87 | | | |
| 145 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) | 63,69 | 2.014.648.902,00 | 1.061,43 | 20,75 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I | | | | | | | | 0,00 | 20.038.713.500,00 | 108,77 | 90,04 | | | |
| 151 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0025 | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 26,07 | 188.947.000,00 | 372,44 | 11,81 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--|----------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 49,83 | 869.464.000,00 | 92,28 | 15,92 | | | |
| 149 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 125,16 | 51.995.186.631,00 | 398,74 | 515,83 | | | |
| 150 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 73,03 | 16.559.679.770,00 | 35,08 | 323,75 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II | | | | | | | | 0,00 | 64.003.503.256,98 | | 373,09 | | | |
| 155 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0025 | Rehabilitasi Jembatan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 155 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 139,12 | 2.436.461.760,00 | 487,29 | 74,97 | | | |
| 152 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 91,69 | 4.519.324.620,00 | 40,17 | 53,80 | | | |
| 153 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 99,96 | 57.047.716.876,98 | 416,43 | 1.460,89 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III | | | | | | | | 0,00 | 28.454.130.800,00 | | 93,81 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|-------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0025 | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 157 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 8,63 | 172.629.800,00 | 53,95 | 10,79 | | | |
| 156 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 107,12 | 29.985.719.600,00 | 340,75 | 170,37 | | | |
| 153 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | =11437184950+23004056216+14 778599188 | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 83,23 | 10.822.634.600,00 | 74,24 | 113,56 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV | | | | | | | | 0,00 | 36.876.186.000,00 | | 206,59 | | | |
| 161 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0025 | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 84,99 | 7.295.090.000,00 | 1.823,77 | 455,94 | | | |
| 162 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 121,34 | 3.758.450.000,00 | 269,65 | 83,52 | | | |
| 159 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 89,33 | 11.950.815.306,31 | 398,36 | 341,45 | | | |
| 160 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 122,90 | 35.016.784.919,62 | 298,02 | 424,45 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------|--|--|-------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V | | | | | | | | 0,00 | 41.593.121.921,00 | | 166,64 | | | |
| 165 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0025 | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 95,41 | 1.075.384.800,00 | 153,63 | 67,21 | | | |
| 165 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 5,89 | 111.837.600,00 | 147,23 | 24,85 | | | |
| 163 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 90,48 | 13.753.372.870,96 | 785,91 | 272,31 | | | |
| 164 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 113,17 | 52.780.454.924,12 | 53,86 | 295,52 | | | |
| UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI | | | | | | | | 0,00 | 17.085.558.650,00 | | 51,31 | | | |
| 165 | 1 | 03 | 10 | 1.00 | 0025 | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 0,00 | | | | | | |
| 169 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 48,62 | 535.106.900,00 | 89,18 | 44,59 | | | |
| 166 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 90,97 | 24.769.098.276,12 | 353,84 | 117,95 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|---|--|--------------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 84,60 | 34.543.715.870,03 | 166,23 | 363,62 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | | | 30,09 | 203.951.651.007,00 | 19,09 | 19,97 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| 9 | 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas | 3,139623 | 58272102 | 2,43375909 | 1,096370687 | | | |
| | | | | | | BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 49 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 170 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 170 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|---|--|------|--|------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0012 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0013 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | 0,00 | | | | | | |
| | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0014 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | |
| 50 | 1 | 03 | 11 | 1.02 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPIJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 172 | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0006 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 172 | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|---|--|------|--|------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 172 | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0009 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 0,00 | | | | | | |
| 51 | 1 | 03 | 11 | 1.03 | | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Persentase Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di Provinsi Riau | 14,77 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | | | |
| | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 173 | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 174 | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib | 39,43 | 0,00 | 146,021 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|---------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | | | | | | | |
| 174 | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 174 | 1 | 03 | 11 | 1.04 | 0008 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun | 0,00 | | | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | 3,14 | 58.272.102,00 | 2,43 | 1,10 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| 10 | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Urusan Penataan Ruang yang Terfasilitasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|------|--|------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Persentase Ketersediaan Dokumen Regulasi Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 180 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 180 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0005 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | Jumlah publikasi informasi penataan ruang | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 180 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0006 | Penetapan RTRW Provinsi | Jumlah Perda RTRW Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 180 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0007 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 180 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | |
| 54 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|------|--|------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0005 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0006 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0009 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota | Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0010 | Penyusunan Peta Dasar | Jumlah data SHP Peta Dasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0011 | Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0012 | Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|---|--|---------------|--|------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1 | 03 | 12 | 1.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 181 | 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0003 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 181 | 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0004 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 181 | 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0005 | Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 181 | 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 181 | 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 55 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi | 80,69 | 1.426.274.634 | 288,18 | 55 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|------------------|--|--------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 95,66 | 1.426.274.634,00 | 4.782,79284 | 713,14 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0005 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0006 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0007 | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0008 | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0010 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0011 | Penilaian Perwujudan RTR | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0012 | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0013 | Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang | Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0014 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 182 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0015 | Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal | Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | 0,00 | - | 0,00000 | 0,00 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|---------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1 | 04 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Pemenuhan RLH Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah | 0,22 | 18.866.250,00 | 0,22 | 0,17 | | | |
| | | | | | | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 0,00 | | | | | | |
| 57 | 1 | 04 | 2 | 1.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Yang Disediakan dan Jumlah Rumah Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Di fasilitasi | 0,22 | 18.866.250,00 | 0,22 | 0,17 | | | |
| 186 | 1 | 04 | 2 | 1.03 | 0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun | 0,45 | 18.866.250,00 | 0,90 | 0,38 | | | |
| 186 | 1 | 04 | 2 | 1.03 | 0011 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | | | 0,22 | 18.866.250,00 | 0,22 | 0,17 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|---|---|--|--------------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | 04 | 3 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani | 9,38 | 3.199.538.732,00 | 5,65 | 12,54 | | | |
| | | | | | | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 0,00 | | | | | | |
| 58 | 1 | 04 | 3 | 1.02 | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar | 9,38 | 3.199.538.732,00 | 29,87 | 12,54 | | | |
| 187 | 1 | 04 | 3 | 1.02 | 0014 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar | 9,38 | 3.199.538.732,00 | 29,87 | 12,54 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | 9,38 | 3.199.538.732,00 | 5,65 | 12,54 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| 15 | 1 | 04 | 5 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman | 48,76 | 129.236.015.629,00 | 304,78 | 807,73 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|-----------------|--|---|--|--------------------|--|-------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 59 | 1 | 04 | 05 | 1.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Jumlah lokasi permukiman | 48,76 | 129.236.015.629,00 | 304,78 | 807,73 | | | |
| 189 | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman | 48,76 | 129.236.015.629,00 | 304,78 | 807,73 | | | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | 0,44 | 3.367.500,00 | 0,44 | 0,173582474 | | | |
| | 2 | 10 | 03 | | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Persentase penatausahaan pertanahan | 11,41 | 21.849.500,00 | 11,41 | 5,462375 | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:1 | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--|---|-----------------------|--|--------|--|-----|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 03 | 1.01 | | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | Persentase Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | 11,41 | 21.849.500,00 | 11,41 | 5,46 | | | | |
| 2 | 10 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah | 11,41 | 21.849.500,00 | 570,43 | 5,46 | | | | |
| 2 | 10 | 04 | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| 2 | 10 | 04 | 1.01 | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | 10 | 04 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | 10 | 04 | 1.01 | 0001 | Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | 10 | 04 | 1.01 | 0002 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| NO | KODE | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR KIN+O21+H:I | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | KETERANGAN | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------|---|---|--|-------------------|--|---------------|------------|---|-----|
| | URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | K | Rp. | | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 10 | 06 | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Yang Terfasilitasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | |
| | 2 | 10 | 03 | 1.01 | | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (%) PROGRAM DINAS PUPRPKP PROVINSI RIAU | | | | | | | | 7,10 | 16.877.735.935,35 | 25,61 | 78,21 | | | |
| PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DINAS PUPRPKP PROVINSI RIAU | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Tinggi | | | |

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan Gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2025– 2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari analisis 9 (sembilan) sasaran strategis, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar merupakan sasaran yang belum tercapai sesuai target. Sementara sasaran strategis lainnya sudah hampir mencapai target.

IV.2. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan Kinerja Masa Mendatang

Secara administrasi pelaksanaan kegiatan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing
2. Melaksanakan dan mengikuti prognosis fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan/item pekerjaan sesuai dengan DPA yang telah disahkan
3. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan/item pekerjaan secara rutin
4. Peningkatan SDM melalui pelatihan

Untuk pencapaian kinerja strategis, permasalahan terkait tidak tercapainya kinerja akibat kewenangan membutuhkan koordinasi intensif atas kesepakatan pencapaian kinerja

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja TA 2025 (ditandatangani).
2. Rincian capaian indikator, definisi operasional, dan sumber data.
3. Rincian realisasi anggaran (DPA/DPPA) dan capaian output.
4. Bukti dukung lainnya (foto, SK, dokumen perencanaan, dsb.).